

**HUBUNGAN KEPERCAYAAN POLITIK DENGAN PERILAKU**

**MEMILIH PADA MAHASISWA DI PEMILU 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Strata  
Satu (S1) Psikologi (S.Psi)



Hanif Nurdianto Eka Putra

J71214040

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Hubungan Kepercayaan Politik dengan Perilaku Memilih pada Mahasiswa di PEMILU 2019” merupakan karya asli hasil penelitian yang diajukan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan agar memperoleh gelar Sarjana Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Karya ini sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surabaya, 15 Agustus 2020



Hanif Nurdianto Eka Putra

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**HUBUNGAN KEPERCAYAAN POLITIK DENGAN PERILAKU MEMILIH  
MAHASISWA PADA PEMILU 2019**

Oleh

Hanif Nurdianto Eka Putra

J71214040

Telah Disetujui untuk Diajukan pada Ujian Skripsi

Surabaya, 15 Juli 2020



Dr. Abdul Muhid, M.Si

NIP. 197502052003121002

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**HUBUNGAN KEPERCAYAAN POLITIK DENGAN PERILAKU  
MEMILIH PADA MAHASISWA DI PEMILU 2019**

Yang disusun oleh :  
Hanif Nurdianto Eka P  
J71214040

Telah dipertahankan didepan Tim penguji  
Pada tanggal 03 Agustus 2020

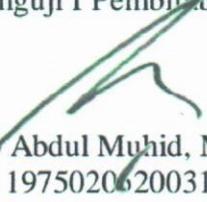


Mengetahui :

Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan

  
Dr. Hj. Siti Nur Asiyah, M.Ag  
NIP : 197209271996032002

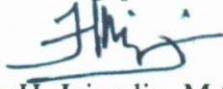
Susunan Tim Penguji  
Penguji I Pembimbing

  
Dr. Abdul Muhid, M.Si  
NIP : 197502062003121002

Penguji II

  
Dr. Nailatin Fauziah, S.Psi, M.Si  
NIP : 197406122007102006

Penguji III

  
Dr. H. Jainudin, M.Si  
NIP : 196205081991031002

Penguji IV

  
Estri Kusumawati, M.Kes  
NIP : 198708042014032003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanif Nurdianto Eka Putra  
NIM : J71214040  
Fakultas/Jurusan : Psikologi dan Kesehatan / Psikologi  
E-mail address : [hanifnurdianto1995@gmail.com](mailto:hanifnurdianto1995@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Hubungan Kepercayaan Politik Dengan Perilaku Memilih Pada Mahasiswa di Pemilu 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2020

Penulis

(Hanif Nurdianto Eka Putra)  
*nama terang dan tanda tangan*

















calon wakil presiden yang digandeng berbeda dengan 5 tahun sebelumnya. Pasangan nomor urut 01, Joko Widodo menggandeng Ma'ruf Amin dan dicalonkan oleh PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura. Sementara, pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno dan dicalonkan oleh Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat (Fernandes, 2018).

Melihat Pemilu Serentak 2019, salah satu perihal menariknya merupakan partisipasi warga yang bertambah signifikan dibanding pemilu sebelumnya. Perihal ini mungkin bisa jadi sebagai indikator demokrasi di Indonesia terus menjadi matang sebab partisipasi merupakan salah satu aspek berarti dalam demokrasi. Selain itu terdapat ketertarikan serta antusiasme warga terhadap Pemilu 2019 yang baru awal kali dilaksanakan serentak dengan memilih presiden/wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/ Kota. Secara nasional, partisipasi warga dalam Pemilu 2019 ialah 81 persen lebih ataupun bertambah nyaris 10 persen bila dibanding pada Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014 partisipasi pilpres sebesar 70 persen sedangkan pileg 75 persen. Jumlah pemilih Pemilu 2019( di dalam serta luar negara) menggapai 199. 987. 870, sedangkan terdapat 158. 012. 506 pemilih yang memakai hak pilihnya ataupun menggapai kisaran 81 persen (kpu.go.id, 2019).

Namun ternyata sistem pemerintahan demokrasi ini memiliki ancaman tersendiri dalam sistemnya, salah satu ancaman tersebut yaitu perilaku tidak memilih (*non voting behavior*) atau biasa disebut golput. Perilaku tidak memilih



memungkiri bahwa gerakan golput belakangan ini gaungnya semakin besar berkat perkembangan teknologi media sosial. Di dunia maya, ajakan untuk golput menyebar salah satunya dengan tagar #SayaGolput. Menurut salah satu pegiat gerakan tersebut, Lini Zurlia mengatakan bahwa menurunnya angka golput bukan berarti gerakan golput telah gagal karena golput sejatinya juga berarti suara yang tidak sah. Golput yang perlu disorot saat ini adalah jumlah suara tidak sah hampir mencapai 2% (bbc.com, 2019).

Bahkan di Surabaya sendiri juga terdapat aksi deklarasi golput yang dilakukan oleh sekelompok santri yang bertempat di Kantor KontraS Surabaya pada tanggal 15 April 2019. Mereka tidak menggunakan hak suaranya dengan alasan bahwa kedua calon presiden diisi oleh parta-partai yang didirikan atau disokong oleh oligarki. Mereka berharap dengan menerapkan politik alternatif tersebut dapat mengembalikan khittah kebangsaan pada rel demokrasi sejati yang mengedepankan kepentingan rakyat. (jatimnet.com, 2019)

Dalam suatu pelaksanaan pemilihan umum baik itu pemilihan umum daerah atau pun pemilihan umum presiden seringkali kita mendengar istilah seseorang golput, baik itu golput secara ideologis, teknis, ataupun apatis. Sebagai contoh dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan pada tanggal 17 april 2019 di salah satu TPS Jakarta Timur, seorang warga yang melakukan golput yang masuk dalam kategori golput ideologis memilih untuk tetap datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya meski menurutnya calon pemimpinnya tidak ada yg ideal, hal yang dilakukan oleh warga ini adalah mencoblos semua nama calon

pada kertas suaranya, hal ini dilakukan dikarena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada surat suaranya. (vice.com, 2019).

Keputusan seseorang untuk memilih ataupun tidak memilih dalam pemilihan umum yang sedang berlangsung merupakan gambaran singkat dari perilaku memilih. Norhabiba (2018) perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih. Susanto (1992) mengatakan aktivitas membuat keputusan, ialah apakah memilih ataupun tidak memilih dalam pilkada, semacam menunaikan kewajiban bagaikan masyarakat negeri, menegaskan bukti diri kelompok serta membuktikan loyalitas terhadap partai.

Dalam teori perilaku memilih memiliki tiga pendekatan yang memiliki perbedaan dalam penjelasan mengapa seseorang memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum yang sedang berlangsung. Pertama, dengan pendekatan sosiologi, kedua melalui pendekatan psikologi, dan ketiga pendekatan rasional. (Lau, 2003; Antunes, 2010; Visser, 1998).

Pengambilan keputusan untuk memilih maupun tidak memilih tidak bisa terlepas dari kedudukan emosi di dalamnya. Berkaitan dengan sikap memilih, emosi yang ikut turut campur tidak cuma emosi secara universal (emosi positif serta negatif), melainkan emosi yang lebih khusus semacam antusiasme serta kecemasan (Cottam, Uhler, Mastors, & Preston, 2004).

Misalnya saja pemilih yang memiliki emosi positif akan diwujudkan dalam bentuk antusiasme dengan mencari banyak informasi mengenai kandidat yang akan menjadi calon pemimpinya. Hal yang sama juga terjadi pada emosi

negatif yang dimanifestasikan dalam bentuk kecemasan. Rasa cemas yang dimiliki individu akan membuka memori jangka panjang mereka. Misalnya saja janji-janji dari pemimpin sebelumnya yang belum dipenuhi sehingga menyebabkan pemilih khawatir terhadap pemimpin selanjutnya yang bisa jadi juga melakukan hal yang sama. Apabila individu merasakan hal tersebut, maka akan memunculkan perilaku apatis dimana individu menghindari objek yang bersangkutan. Dengan kata lain individu lebih senang menjadi *non-voters* atau golput daripada harus berurusan dengan hal yang tidak ia sukai. Dalam suatu penjelasan psikologis, Hadjar dan Beck (2010) menjelaskan bahwa perilaku tidak memilih juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adalah *political efficacy*, *political interest*, dan juga *political trust*.

*Political trust* dapat diartikan sebagai kepercayaan individu terhadap komponen-komponen sistem politik yang berlaku saat ini (Matulesy,2018). Kepercayaan politik (*political trust*) menjadi evaluasi mendasar pada sistem pemerintahan, pada dasarnya pemerintahan yang ada pada saat ini karena kepercayaan masyarakat (Hetrington, 1998).

Richard Fenno (dalam Turska-Kawa, 2015) berusaha mendefinisikan arti kepercayaan politik dengan mengacu dari pandangan *voters* (pemilih). Menurutnya jika pemilih mempercayai orang-orang yang akan mewakili mereka di parlemen, maka di pikiran mereka adalah: saya siap menyerahkan (nasib) diri saya ke tanganmu. Saya tahu kamu mungkin akan menyakiti saya, meskipun saya tidak tahu kapan. Namun saya berasumsi bahwa itu tidak akan kamu lakukan dan aku tidak akan khawatir mengenai itu.



ini. Penelitian tentang kepercayaan politik di negara ini masih jarang dilakukan. Hal ini terlihat dari masih langkanya kajian-kajian mengenai kepercayaan politik yang muncul dalam jurnal psikologi atau pun artikel ilmiah pada umumnya. Keadaan ini sangat mengherankan mengingat pentingnya suatu kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

Penelitian terbaru mengenai kepercayaan politik di Indonesia dilakukan oleh Akhrani, Imansari dan Faizah (2018) dengan judul “Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula” mengungkapkan mengenai terdapatnya korelasi signifikan antara kepercayaan politik dan partisipasi politik. Hal ini berarti semakin tinggi kepercayaan politik maka akan tinggi pula partisipasi politiknya.

Penelitian lainnya mengenai kepercayaan politik yaitu “Kepercayaan Politik Mahasiswa Santri terhadap Kiai dalam Perspektif Psikologi Perkembangan” penelitian ini diteliti oleh Taufiqurrahman dan Himam (2014) mendapatkan hasil keyakinan politik mahasiswa santri terhadap kiai ialah wujud identifikasi yang didasarkan pada kedekatan interpersonal yang paternalistik. Paternalisme melahirkan inklusivisme politik dalam kelompok yang dikuatkan oleh evaluasi terhadap konsistensi, kompetensi, serta performansi kyai selaku pemimpin politik.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa relasi interpersonal yang terjadi di lingkungan pondok pesantren dapat memupuk tingkat kepercayaan politik pada santri. Hal ini dibuktikan oleh Anderson, M. R. (2010) dalam jurnalnya yang berjudul “*Community Psychology, Political Efficacy, and*

*Trust*” menyatakan bahwa pengaruh sosial seperti komunitas menunjukkan hubungan positif dan signifikan pada internal dan eksternal kepercayaan pribadi dan politik, terlepas dari sifat-sifat individu seperti pendapatan, umur, jenis kelamin, dan pendidikan.

Begitu pentingnya kepercayaan politik dalam suatu negara, maka penting juga untuk menelaah penilaian seseorang mengenai kepercayaan politik. Kepercayaan dalam psikologi merupakan suatu interaksi sosial. Berbagai asumsi mengenai kepercayaan politik menganggap bahwa suatu objek yang biasa di percaya oleh orang lain belum tentu dianggap berkompeten dan bertanggung jawab.

Studi mengenai kepercayaan politik juga banyak diteliti diluar negeri. Salah satu penelitian dengan judul “*A Cognitive Anatomy of Political Trust and Respective Bases: Evidence from a Two-City Survey in China*” yang mendapatkan hasil bahwa penduduk Tionghoa dapat membedakan secara efektif antara pusat kompetensi mereka dengan niat pemerintah, rata-rata rakyat memiliki penilaian yang cukup positif terhadap pemerintah pusat untuk melayani rakyatnya meskipun sedikit pesimis terhadap mewujudkan pemerintah yang baik (Jie Lu, 2014).

Adapun penelitian yang menjelaskan kaitan antara kepercayaan politik dengan perilaku pemilih dilakukan oleh Gronlund & Setala (2007) mendapatkan hasil bahwa kepercayaan pada parlemen memiliki peran dalam peningkatan pemungutan suara.

Penelitian yang dilakukan oleh Hooghe, Marien & Pauwels (2011) telah mengemukakan bahwa ketidakpercayaan politik dikaitkan dengan tingkat





akan mengakibatkan respon negatif seperti kecewa dan hilangnya rasa kepercayaan.

Newton (2008) menjelaskan bahwa kepercayaan politik tidak didasari pada hubungan horizontal saja melainkan juga hubungan vertikal antara warga negara dengan otoritas atau lembaga politik di suatu negara. Hal ini didasarkan pada sistem, aturan, dan prosedur (Braun, 2011).

Merujuk pada pembahasan mengenai teori dasar kepercayaan, hakikatnya sesuatu kepercayaan politik tidak berbeda dengan kepercayaan pada biasanya. Kepercayaan memfokuskan pada pembahasan keterkaitan dengan politik. Kepercayaan politik pula bisa dimaksud dengan keyakinan orang terhadap komponen- komponen sistem politik yang berlaku dikala ini. Misztal (2001) mengatakan bahwa keyakinan merupakan sesuatu elemen berarti dalam demokrasi serta terdapat bermacam berbagai jenis tentang keyakinan yang terpaut dengan perbandingan konteks, misalnya organisasi, sistem politik serta keluarga. Dalam makna yang sempit bahwa kepercayaan politik hanya terpaku pada kajian tentang kepercayaan yang terkait proses psikologi untuk permasalahan politik.

Keyakinan politik bukan hanya membahas pada rasa yakin pada instansi pemerintah, namun juga segala elemen juga terkait pada sistem pemerintahan tersebut. Dijelaskan oleh Gamson (dalam Muluk & Reksodiputro, 2005) segala aksi pemerintah agar sanggup mencakup kepercayaan politik warga wajib berperan sesuai kepentingan dirinya sendiri maupun publik.

Kepercayaan politik terjadi jika pemerintah dinilai dengan baik oleh masyarakat jika mampu membuat kebijakan atau pemimpin politik dapat menepati janji politiknya, efisien, adil, dan jujur (Blind, 2006). Citrin (1974) menyebutkan kepercayaan politik bukan evaluasi pada sistem politik yang berlaku, melainkan bentuk evaluasi pada kualitas etis dari pemimpin politik. Zhang dan Wang (2010) harapan masyarakat kepada pemerintah yang ditentukan oleh kesesuaian kebijakan yang berlaku.

Miller dan Listhaug (1990) menjelaskan bahwa kepercayaan politik adalah suatu ceminan dari evaluasi apakah pemegang otoritas dan lembaga politik yang tampil mampu berperilaku sesuai normatif yang dimiliki publik.

## **2. Faktor-Faktor Kepercayaan Politik**

### **a. Harapan Masyarakat**

Political trust ialah harapan publik (*public expectation*) pada pemimpin untuk menanggapi, mengagregasikan dan mengartikulasikan tuntutan serta aspirasi warga. Tetapi apabila pada realitasnya, harapan serta keyakinan publik tersebut bertolak balik dengan kenyataan, maka ketidakpuasan serta kemarahan rakyat terus menjadi dan memuncak hingga gerakan massa serta aksi solidaritas selali bermunculan dari berbagai lapisan masyarakat (dalam Samaloisa, 2009). Kepercayaan yang diartikan merupakan evaluasi seorang





mampu menyelesaikan masalah, tidak memiliki motivasi dalam menjaga kepentingan masyarakat dan negara (McLean, 2006).

- c. *Fairness*, artinya seseorang akan yakin pada pemerintahan jika wakil rakyat melakukan suatu proses yang *fair*, *legitimate*, dan *accountable*. Misztal mekankan bahwa *social capital* juga terkait dengan kepercayaan. Semakin tinggi *social capital* atau kepercayaan akan mendorong masyarakat untuk bekerja sama dan berperan penting dalam demokrasi dan melakukan pembaruan dalam masalah ekonomi.

Sedangkan menurut Grimmerlikhuijesen dan Knies (2015) kepercayaan politik terdiri atas tiga aspek yaitu:

- a. *Perceived competence*, didefinisikan sejauh mana masyarakat melihat apakah pemerinta mampu, cakap, profesional dan berkompeten dalam berkarya.
- b. *Perceived benevolence*, diartikan sejauh. mana masyarakat melihat apakah pemerintah acuh terhadap kehidupan masyarakatnya dan termotivasi untuk bertindak atas dasar kepentingan bersama.
- c. *Perceived integrity*, merupakan sejauh mana rakyat melihat ketulusan, kejujuran dan dipenuhinya janji-janji dari pemerintah.





Susanto (1992) menyatakan bahwa perilaku memilih merupakan rangkaian dari kegiatan mengambil keputusan; memilih ataupun tidak memilih dalam pemilihan umum, seperti menunaikan kewajibannya sebagai masyarakat, menunjukkan loyalitas pada partai dan memperkuat identitas kelompok.

## **2. Faktor – Faktor Psikologis Perilaku Memilih**

Faktor psikologi perilaku memilih adalah gambaran dari kepribadian individu, ini adalah variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik individu. Oleh sebab itu faktor psikologi menggaris bawahi pada 3 aspek, yakni ikatan emosional pada suatu partai, orientasi pada isu-isu tertentu dan orientasi kandidat (Asfar, 2006)

Faktor psikologi merupakan kondisi dinamik psikologi yang dialami dan dirasakan oleh seseorang yang mampu merangsang tindakannya untuk memberikan suaranya atau memilih seorang kandidat calon terpilih yang dapat memengaruhi individu untuk menentukan pilihannya. Menurut uluk (2012) sebagai faktor ikatan emosional pada partai yang didalamnya memiliki reaksi psikologis yang memiliki kesamaan dalam visi misi untuk memenagkan dan mendukung penuh pada salah satu calon kandidat pada pemilu. Faktor isu yang berkembang merupakan tindakan pemilih atau memilih kandidat tertentu yang menawarkan solusi yang tepat dan memiliki program kerja yang relevan. Sedangkan orientasi terhadap kandidat dukungan atau pemilih untuk

memilih figur calon terpilih yang berdasarkan pada sifat, kepemimpinan, rekam jejak selama berkiprah di lingkungan sosial yang dimiliki oleh kandidat tersebut.

Pengembangan model perilaku memilih sehingga perilaku memilih ditentukan oleh tiga model yang memengaruhi yaitu:

1. Perasaan emosional pada partai merupakan aspek emosional yang ditunjukkan oleh partai dan kandidatnya dengan menggunakan penwaran-penwaran politik.
2. Isu-isu kebijakannya yang didalamnya terdapat program-program yang dijanjikan dan diperjuangkan oleh kandidat.
3. Citra kandidat merujuk pada kepribadian calon terpilih yang dipandang sebagai karakter kandidat.

Hutington (2012) mengelompokkan pemilih menjadi empat segmen berdasarkan perilaku pemilih bagian dari *political marketing*, antara lain :

- a. Pemilih rasional. Segmen ini mencakup pemilih yang fokus perhatiannya terhadap masalah dan kebijakan calon terpilih dalam menentukan pilihannya.
- b. Pemilih emosional. Segmen pemilih yang dipengaruhi oleh emosi tertentu dalam menentukan pilihannya. Faktor perasaan ini sangat ditentukan oleh faktor personalitas calon terpilih.



saudara, suami/istri, teman, lingkungan kerja, dan lainnya. *Voters* hidup dalam lingkungan tertentu: status ekonominya, agamanya, tempat tinggal, pekerjaan dan usia mengartikan *social circle* yang mampu memengaruhi keputusan untuk memilih. Setiap *social circle* memiliki batasannya sendiri, tunduk pada norma-norma menghasilkan integrasi. Namun hal tersebut turut mengatur perilaku dengan cara memberi tekanan agar individu dapat beradaptasi, sebab pada dasarnya setiap individu membutuhkan kehidupan yang nyaman, tanpa adanya konflik dengan lingkungan sosialnya.

Perubahan perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah predisposisi politis lingkungan sosialnya tersebut. Keluarga dan lingkungan pergaulan adalah penyumbang terbesar dalam mempengaruhi individu dalam memilih.

b. *Pendekatan Sosial Psikologis*

Disisi lain penelitian pemilihan umum dari Columbia mengkaitkan perilaku pemilihan umum pada lingkup kemasyarakatan dimana seseorang tinggal, maka sekelompok ahli ilmu sosial dari University of Michigan di Ann Arbor memposisikan seseorang tersebut sebagai *centered of interest*. Menurut Ann Arbor School, penilaian dan persepsi pada calon terpilih atau isu yang diangkat sangat berpengaruh pada pilihan saat pemilu. Selain itu, “keanggotaan Psikologis” dalam sebuah partai yang dapat ditakar dalam bentuk variabel *Party-ID*, turut mempengaruhi pilihan pemilu. Oleh karena itu keputusan pemilu

masing-masing individu secara primer tidak ditentukan secara sosial struktural, melainkan lebih merupakan hasil pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap sang individu.

Penjelasan pengembangan yang dilakukan oleh Campbell, Gurin dan Miller (1954) mengenai rancangan dari model sosial psikologi pada perilaku pemilih yang berkaitan dengan pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1948 dan 1952. Beberapa tahun kemudian terbitlah karya utama para peneliti pemilu tersebut, yakni *The American Voter*. Karya tersebut menyempurnakannya dengan hasil penelitian mereka terhadap pemilu kongres pada tahun 1954 dan pemilu presiden tahun 1956. Untuk menguji rancangan awal mereka, maka mereka (tim Campbell) melakukan peninjauan pada pemilih yang sama saat sebelum dan sesudah pemilihan umum tersebut.

Pendekatan sosial psikologis menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemilihan umum jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat. Hal ini berusaha dijelaskan melalui trias determinan, yaitu identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu. Faktor lainnya yang sudah ada sebelumnya (anggota dalam suatu kelompok sosial) dianggap memberikan pengaruh langsung terhadap perilaku pemilu. Inti pemikiran tersebut akhirnya dituangkan dalam bentuk sebuah variabel yakni identifikasi partai. Variabel ini digunakan untuk mengukur jumlah faktor faktor predisposisi pribadi maupun politik yang relevan

bagi seorang individu. Apabila faktor-faktor predisposisi (seperti misalnya pengalaman pribadi atau orientasi politik) sebagai suatu aliran yang dituangkan melewati sebuah corong, maka identifikasi partai yang merupakan semacam keanggotaan psikologis partai, dapat diumpamakan sebagai sebuah saringan dalam corong kasual ini (bdk. Campbell et al. 1960: 24-32).

c. *Pendekatan rational-choice*

Berdasarkan pendekatan *rational-choice*, yang paling menentukan saat pemilihan umum tidak hanya mengenai adanya ketergantungan terhadap relasi sosial struktural atau relasi partai yang kuat, namun hasil penilaian rasional dari masyarakat yang berpengaruh (*influencer*).

Menurut Key, masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan memberikan penilaian terhadap kinerja partai yang menjalankann pemerintahan pada periode legislatif terakhir, apakah sudah baik bagi dirinya sendiri khususnya dan bagi negara pada umumnya, atau malah sebaliknya. Penilaian ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap kinerja pemerintah di masa sebelumnya. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintah yang berkuasa (bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Namun jika sebaliknya hasilnya negatif, pemerintah tersebut tidak akan dipilih lagi (Key 1966).

Saat pemilihan umum, keputusan pemilih yang rasional selalu berfokus pada hasil pencapaian yang dilakukan oleh kandidat atau partai tertentu dalam politik baik hasil yang diantisipasi maupun yang dipersepsikan. Jika menurut model Key yang menentukan keputusan pemilih hanyalah jumlah semua prestasi yang dicapai pemerintah, maka model-model berikut dibedakan berdasarkan masing-masing bidang politik (Fiorina, 1981). Konsep yang dijelaskan dalam subab terakhir ini dapat dimengerti sebagai perkembangan yang jelas dan lebih lanjut dari sebuah cabang pendekatan sosial psikologis, yakni orientasi isu, penilaian terhadap kompetensi tiap kandidat dan partai dalam menemukan solusi dari berbagai permasalahan negara.

### **C. Hubungan Kepercayaan Politik dengan Perilaku Memilih Mahasiswa**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bentuk demokrasi. Pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang dilaksanakan dengan suasana keterbukaan, kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat dalam berdemokrasi (Sarbaini, 2015).

Dalam suatu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) kita tentu dapat menemukan berbagai bentuk perilaku individu terkait responnya terhadap pesta demokrasi ini misalnya perilaku aktif mengikuti kampanye ataupun perilaku tidak memilih (golput), dalam kajian psikologi disebut dengan perilaku memilih. Budiharjo (2001) dalam mendefinisikan perilaku

memilih sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, diantara lain dengan menentukan pemimpin yang akan mereka pilih dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Banyak hal yang mempengaruhi perilaku memilih, salah satunya adalah kepercayaan. Menurut Glenn R. Parker (1989) kepercayaan adalah karakteristik paling penting dari tokoh politik tertentu dalam konteks mendapatkan dukungan dalam pemilihan, melebihi signifikansi keterampilan kepemimpinan, pengalaman dan karakteristik pribadi lainnya.

Richard Fenno (dalam Turska-Kawa, 2013) berusaha mendefinisikan arti kepercayaan politik dengan mengacu dari pandangan *voters* (pemilih). Menurutnya jika pemilih mempercayai orang-orang yang akan mewakili mereka di parlemen, maka di pikiran mereka adalah: saya siap menyerahkan (nasib) diri saya ke tanganmu. Saya tahu kamu mungkin akan menyakiti saya, meskipun saya tidak tahu kapan. Namun saya berasumsi bahwa itu tidak akan kamu lakukan dan aku tidak akan khawatir mengenai itu.

Gronlund & Setala (2007) mendapatkan hasil bahwa kepercayaan pada parlemen memiliki peran dalam peningkatan pemungutan suara. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Turska-Kawa (2013) menunjukkan bahwa kesuksesan dan kekayaan negara bergantung pada tiga faktor yang saling terkait: optimisme, keyakinan rakyat bahwa mereka memiliki



memunculkan perilaku apatis dimana individu menghindari objek yang bersangkutan. Dengan kata lain individu lebih senang menjadi non-voters atau golput daripada harus berurusan dengan hal yang tidak ia sukai. Dalam suatu penjelasan psikologis, Hadjar dan Beck (2010) menjelaskan bahwa perilaku tidak memilih juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adalah *political trust*.

Campbell dkk (1960) mengemukakan bahwa salah satu pendekatan yang digunakan untuk memupuk rasa percaya kepada sebuah institusi politik di sebuah negara adalah pendekatan sosial psikologis. Pendekatan ini menurut Campbell berusaha menerangkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan perilaku memilih yang dijelaskan melalui identifikasi partai yang dimiliki seseorang tersebut yakni perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya atau ia merasa dekat dengan partai politik tertentu, kemudian bagaimana pandangan orang tersebut terhadap kandidat yang akan dipilihnya (orientasi kandidat) hingga seberapa relevan apa yang disampaikan oleh kandidat-kandidat tersebut terhadap isu real yang sedang terjadi disekitar lingkungan individu tersebut (orientasi isu).

Dari ketiga trias determinan tersebut, menurut Campbell memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku seseorang dalam sebuah pemilihan umum dan ketiga trias determinan tersebut didasari oleh bagaimana seorang individu memiliki sebuah kepercayaan terhadap politik di negaranya yang akan memiliki dampak langsung terhadap bagaimana









Berdasarkan pertimbangan waktu dan keterwakilan data, maka peneliti secara etis dapat memutuskan pengambilan subjek penelitian di 4 fakultas, antara lain:

- a. Fakultas Psikologi dan Kesehatan
- b. Fakultas Syariah dan Hukum
- c. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- d. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Selanjutnya total keseluruhan subjek yang peneliti ambil untuk masing-masing fakultas adalah 35 subjek. Hal ini sesuai pemaparan dari Roscoe (dalam Sugiyono, 2012) yang menyatakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel minimum adalah 30. Oleh sebab itu, total keseluruhan subjek yang akan peneliti ambil adalah 140 subjek.

### **3. Teknik Sampling**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *random sampling* dengan teknik *insidental sampling*. Menurut Sugiyono (2012) *insidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, maksudnya adalah siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti asalkan memenuhi kriteria subjek, maka dapat digunakan sebagai sampel.

## C. Metode Pengumpulan Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan tehnik pengambilan data berupa kuesioner. Menurut Aldridge & Levine (2001) kuesioner adalah formulir yang didalamnya berisi pernyataan ataupun pertanyaan dimana responden diperintahkan untuk menyelesaikan dan mengembalikan kepada peneliti.

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah skala Kepercayaan Politik dan Perilaku Memilih. Adapun jenis skala yang digunakan oleh peneliti merupakan skala likert dengan empat kategori jawaban. Tujuan dari pemilihan skala likert ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pemusatan terhadap jumlah respon yang bersifat netral. Pernyataan variabel (*favorable*) dan tidak mendukung variabel (*unfavorable*) merupakan model dari skala ini. Responden diperintahkan memilih salah satu dari empat kategori jawaban yang masing-masing menunjukkan kesesuaian pernyataan yang diberikan dengan kondisi dan situasi yang benar-benar dirasakan oleh responden.

Empat kategori jawaban yang digunakan untuk mengukur variabel kepercayaan politik dan perilaku memilih kontinum jawaban yang digunakan yaitu “Sangat Tidak Sesuai”, “Tidak Sesuai”, “Sesuai”, dan “Sangat Sesuai”. Pemberian skor tertinggi pada pilihan “Sangat Sesuai” dan terendah pada pilihan “Sangat Tidak Sesuai” untuk pernyataan *favorable*. Selanjutnya, skor tertinggi pada pernyataan *unfavorable*





## D. Validitas dan Realibilitas

### 1. Validitas

Suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kesahihan sebuah instrumen disebut dengan validitas. Sebuah instrumen yang sah memiliki tingkat kesahihan (validitas) yang tinggi. Sedangkan, instrumen yang kurang sah berarti memiliki tingkat kesahihan (validitas) rendah. Tinggi ataupun rendahnya tingkat validitas instrumen menunjukkan menyimpang atau tidaknya dapat dilihat melalui penjelasan mengenai validitas yang dimaksud (Arikunto, 2019). Validitas menunjukkan seberapa kecermatan dan ketepatan suatu instrumen dalam melakukan fungsi ukurnya. Sehingga valid atau tidaknya sebuah instrumen dapat dilihat pada mampu atau tidaknya instrumen tersebut mencapai tujuan yang dikehendaknya (Azwar, 2013).

Validitas dalam skala penelitian yang diadaptasi dari penelitian Nurfitri (2018) dan Syukuri (2018) menggunakan validitas konstruk (*construct validity*) dan validitas isi (*content validity*). Menurut Ghazali (2013) validitas konstruk menguji sejauh mana hasil yang didapat apakah baik atau tidak saat digunakan untuk pengukuran dengan teori yang ada. Seluruh skor dari setiap butir pernyataan dengan skor total dari keseluruhan butir dikorelasikan sehingga dapat diperoleh validitas konstruk. Kesesuaian antara fungsi item dengan skala keseluruhan ditunjukkan dengan adanya hubungan yang tinggi dan positif. Teknik korelasi *part-whole* digunakan untuk melihat koefisien korelasi antara

item dengan skor totalnya. Kevalidan item ditentukan dengan menggunakan peluang kesalahan  $\leq 0.05$  atau taraf signifikansi sebesar 5%. Hal ini dapat diartikan bahwa item instrumen yang diuji tidak boleh dipakai sebagai bahan analisis penelitian dan harus digugurkan apabila peluang kesalahannya lebih besar dari 0.05,.

Berbeda dengan validitas konstruk, validitas isi menurut Gall, Gall, & Borg (2012) yaitu sejauhmana item dalam sebuah instrumen mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur oleh alat ukur bersangkutan atau berhubungan dengan representasi dari keseluruhan kawasan. Oleh sebab itu jenis validitas ini diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur dengan analisis rasional. Blueprint yang dijadikan dasar penyusunan instrumen dan butir-butir soal akan terlebih dahulu dicermati dan dinyatakan baik, sehingga perlu dilakukan uji validitas isi.

Rumus korelasi *product moment* digunakan dalam penelitian ini. Sehingga kedua alat ukur diuji validitasnya guna mendapatkan nilai koefisiennya. Setelah memperoleh nilai koefisien, maka korelasi harus dikoreksi karena untuk meminimalisir kelebihan bobot aitem, untuk mengoreksinya maka akan digunakan teknik korelasi *part-whole*. Rumus koefisien korelasi *part-whole* merupakan pra-syarat yang digunakan agar suatu instrumen dapat dinyatakan valid bila nilai  $r$  hitung lebih besar dari nilai  $r$  tabel.





---

5	0.653	0.273	VALID
6	0.358	0.273	VALID
7	0.426	0.273	VALID
8	0.357	0.273	VALID
9	0.633	0.273	VALID
10	0.005	0.273	TIDAK VALID
11	0.331	0.273	VALID
12	0.606	0.273	VALID
13	0.421	0.273	VALID
14	0.398	0.273	VALID
15	0.660	0.273	VALID
16	0.445	0.273	VALID
17	0.657	0.273	VALID
18	0.445	0.273	VALID
19	0.591	0.273	VALID
20	0.547	0.273	VALID
21	0.408	0.273	VALID
22	0.645	0.273	VALID
23	0.443	0.273	VALID
24	0.641	0.273	VALID
25	0.039	0.273	TIDAK VALID
26	0.566	0.273	VALID
27	0.567	0.273	VALID

---



## 2. Reliabilitas

Setelah dilakukan uji validitas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas. Reliabilitas yaitu sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi (keajegan) dari jawaban responden terhadap suatu alat ukur psikologis yang disusun dalam bentuk kuesioner (Azwar, 2010). Adapun rumus yang digunakan yaitu rumus *alpha cronbach* yang bertujuan mendapatkan hasil reliabilitas yang cermat.

Menurut Azwar (2010) semakin reliabel alat ukur yang digunakan maka semakin kecil kesalahan pengukuran, hal ini berarti semakin besar nilai koefisien reliabilitasnya. Namun sebaliknya, apabila semakin besar kesalahan pengukuran yang berdampak pada semakin tidak reliabelnya alat ukur yang digunakan, maka semakin kecil koefisien reliabilitas yang dihasilkan. Suatu penelitian yang reliabel hasilnya akan tetap sama apabila diukur pada waktu yang berbeda.

### E. Analisis Data

Korelasi *product moment* digunakan untuk menguji penelitian ini. Menurut Creswell (2015) analisis korelasional digunakan dengan tujuan untuk menghubungkan dua variabel atau lebih dan untuk melihat apakah mereka saling mempengaruhi. Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah kepercayaan politik memiliki korelasi positif dengan

















yang mendapatkan nilai rerata terkecil yaitu berasal dari fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan skor rerata 72.50 dengan standart deviasi 11.04.

#### **b. Reliabilitas Data**

Peneliti melakukan uji *Cronbach's Alpha* untuk menentukan apakah kedua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel ataupun tidak sebagai alat ukur. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan mencobakan instrumen sekali kemudian dapat diperoleh dan dianalisis dengan sebuah teknik tertentu hal inilah yang biasa disebut dengan *internal consistency*. Hasil dari anaisis tersebut dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas intrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan rumus *Cronbach's Alpha* sebab data yang digunakan berupa data interval.

Uji reliabilitas dilakukan pada seluruh butir pernyataan. Setelah dilakukan uji reliabiitas dengan menggunakan SPSS 17 maka akan didapatkan koefisien reliabilitas. Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan reliabilitas alat ukur pada penelitian ini. Alat ukur yang dikatakan reliabel memiliki ketentuam apabila nilai  $r$  (*Cronbach's Alpha*) lebih besar dari 0.60. Namun, alat ukur yang dikatakan tidak reliabel jika nilai  $r$  (*Cronbach Alpha*) lebih kecil dari 0.60. Hasil uji reliabilitas instrumen ditunjukkan sebagai berikut:







linear antar kedua variabel dalam penelitian ini yaitu kepercayaan politik dan perilaku memilih.

Berdasarkan kedua uji prasyarat yang dilakukan, yaitu pada uji normalitas menunjukkan bahwa kedua variabel kepercayaan politik dan perilaku memilih keduanya dinyatakan memiliki sebaran yang normal sesuai pra syarat uji normalitas. Demikian pula dengan uji linearitas yang dilakukan pada kedua variabel penelitian ini menghasilkan bahwa kedua variabel bersifat linear. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan dan variabel perilaku memilih telah memenuhi syarat untuk dianalisis dengan menggunakan tehnik uji product moment yang merupakan tehnik korelasi parametrik.

#### **4. Uji Hipotesis**

Seperti yang sudah dijelaskan pada metode penelitian, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tehnik uji korelasi *product moment* karena data yang merupakan penelitian parametrik. Pengertian dari penelitian parametrik sendiri adalah suatu uji statistik yang memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data dari populasi. Statistik ini dapat digunakan untuk menganalisis jenis data yang berskala karena pada jenis data tersebut biasanya berdistribusi normal sebab statistik parametrik juga mensyaratkan bentuk dari sebaran populasinya untuk berdistribusi normal.

Dengan melakukan uji korelasi *product moment*, peneliti dapat memperoleh hasil apakah variabel Kepercayaan Politik dengan variabel



Berdasarkan tabel hasil uji korelasi product moment di atas dapat diketahui bahwa taraf signifikansi yang didapatkan sebesar 0.000 yang jauh lebih kecil dari 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kepercayaan politik dengan perilaku memilih pada mahasiswa UINSA diterima. Sehingga asumsi dasar penelitian yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai kepercayaan politik yang dimiliki seorang mahasiswa akan diikuti semakin tinggi pula skor untuk perilaku memilih pada mahasiswa dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan nilai koefisien korelasi yang didapatkan yakni sebesar 0.331 oleh karenanya dapat diketahui bahwa hubungan antar dua variabel penelitian yaitu kepercayaan politik dan perilaku memilih berada pada tingkat keeratan sedang. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam tabel interpretasi koefisien korelasi milik Sugiyono (2007) yang menunjukkan bahwa skor 0.30 – 0.499 dapat dikategorikan memiliki keeratan hubungan antar variabel pada taraf sedang. Selain itu dapat diketahui pula arah korelasi pada kedua variabel penelitian ini yaitu bersifat positif dimana apabila individu mempunyai kepercayaan politik yang tinggi maka tinggi pula kecenderungan melakukan perilaku memilih pada individu tersebut dan begitu pula sebaliknya.

Selanjutnya ditemukan hasil bahwa variabel kepercayaan politik memiliki pengaruh sebesar 10% terhadap perilaku memilih mahasiswa. Selebihnya perilaku memilih dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang akan

dijelaskan pada sub bab pembahasan. Hasil tersebut diperoleh dari sumbangan efektif penelitian sebesar 0.102 ( $r^2$ ) dimana nilai  $r$  adalah  $(0.331^2)$  sehingga menghasilkan nilai 0.102.

## **B. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara kedua variabel Kepercayaan Politik dengan Perilaku Memilih pada Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian yang dilakukan merupakan sebuah penelitian parametrik maka dari itu telah dilakukan uji prasyarata seperti uji normalitas dan uji linearitas, berdasar uji yang telah dilakukan kedua variabel memenuhi prasyarat penelitian parametrik yaitu data yang digunakan normal dan linear. Untuk uji korelasinya, karena merupakan penelitian parametrik maka analisis data yang digunakan adalah *product moment* untuk melihat apakah taraf signifikansi yang dihasilkan sesuai dengan prasyarat yang digunakan dalam penelitian.

Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis korelasi menggunakan *product moment* menunjukan bahwa nilai taraf signifikansi yang didapat yakni sebesar 0.000, yang dapat diketahui bahwa lebih rendah dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ). Oleh karenanya hasil tersebut menandakan bahwa hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima sementara hipotesis nihil pada penelitian ini ditolak yang berarti terdapat hubungan yang terbukti secara signifikan antara dua variabel penelitian yaitu Kepercayaan Politik dengan Perilaku Memilih pada Mahasiswa.

Pada penelitian ini juga menghasilkan skor koefisien korelasi sebesar 0.331 hal tersebut berarti membuktikan bahwa terdapat korelasi antar kedua variabel yang digunakan dalam penelitian ini berada pada kategori keeratan sedang. Kemudian, dengan skor yang diperoleh merupakan sebuah skor dengan nilai positif maka menandakan hubungan kedua variabel penelitian ini yaitu Kepercayaan Politik dengan Perilaku Memilih bersifat positif yang berarti semakin tinggi nilai salah satu variabel akan diikuti nilai yang tinggi juga dari variabel satunya, atau yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semakin tinggi tingkat Kepercayaan Politik seseorang maka akan diikuti pula tingginya kecenderungan orang dalam melakukan Perilaku Memilih.

Pada penelitian yang dilakukan, mendapatkan hasil bahwa jumlah subjek dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak menjadi responden daripada subjek laki-laki. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan jika perempuan secara umum memiliki tingkat empati sosial yang lebih tinggi (Furnham, 2011), maka dari itu perempuan akan lebih aktif dalam peran sosialnya untuk menentukan sebuah pilihan yang berdampak pada kehidupan sosialnya kelak. Maka dari itu dapat dipastikan perilaku memilih merupakan sebuah bentuk perilaku sosial yang menjadi salah satu dari sekian hal dalam lingkup sosial yang akan banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Berdasarkan perbedaan gender ini dapat dipastikan bahwa kedua gender baik laki-laki maupun perempuan memiliki sikap yang berbeda perihal pandangan politik maupun perilakunya.

Asfar (2006) berpendapat bahwa terdapat tiga aspek psikologis yang mempengaruhi bagaimana seseorang dalam melaksanakan sebuah praktik perilaku memilih. Ketiga aspek itu diantaranya adalah bagaimana ikatan emosional yang terjalin antara seorang individu dengan sebuah partai sehingga seorang tersebut bisa melakukan sebuah keputusan untuk memilih pada salah satu partai tersebut dan melaksanakan perilaku memilih, yang kedua yaitu bagaimana orientasi individu terhadap isu-isu yang sedang ramai dibicarakan pada sebuah periode pemilu sehingga individu bisa melihat bagaimanakah program-program seorang calon kandidat bisa relevan terhadap isu-isu tersebut atau tidak, dan yang ketiga adalah citra kandidat yang bisa dibayangkan bagaimana pandangan individu dalam melihat seorang kandidat dari sisi historisnya maupun kepribadiannya sebagai manusia terlepas dari partai atau atribut apapun. Hal tersebut tentunya sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Newton (2008) dimana menurutnya pada setiap kepercayaan politik selalu dilandasi dengan hubungan vertikal antara warga negara dengan otoritas atau lembaga politik yang berhubungan langsung dengan sistem, prosedur atau aturan negara.

Adapun hasil penelitian yang menyatakan adanya hubungan antara Kepercayaan Politik dengan Perilaku Memilih sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhrani, dkk (2018) yang menjelaskan bahwa pada pemilihan pemilu pun, partisipasi dalam proses pemilu dipengaruhi oleh bagaimana tingkatan kepercayaan politik yang dimiliki oleh individu tersebut. Semakin tinggi sebuah trust yang tercipta pada pemilihan pemilu pada sebuah sistem

politik, maka akan tinggi pula tingkat partisipasi individu tersebut dalam sebuah pemilu dan melakukan pemilihan pertamanya. Hal tersebut menandakan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan politik yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula perilaku memilih yang akan dihasilkan oleh seseorang individu dalam berpartisipasi pada setiap kegiatan pemilihan umum.

Taufiqurrahman dan Himam (2014) juga sependapat dengan bagaimana Kepercayaan Politik dapat mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan perilaku memilihnya. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kepercayaan politik yang dimiliki seorang santri terhadap seorang kiai ataupun panutannya dalam kehidupan sehari-hari mampu mendorong santri tersebut terlibat langsung dalam melakukan perilaku memilih karena citra diri yang dimiliki kiai tersebut kepada santrinya cukup kuat sehingga hal tersebut mendorong para santri untuk turut andil dalam melaksanakan pemilihan. Hal tersebut juga memiliki andil dalam bagaimana image seorang kiai yang menjadi seorang pemimpin partai politik bisa memiliki dukungan yang luar biasa karena relasi antara santri dan kiai ini tidak hanya terjadi pada lingkup yang kecil namun lebih kepada bagaimana konsistensi, kompetensi atau performansi kiai tersebut dapat dinilai secara global dan menjadi image yang sempurna bagi para santri untuk ikut langsung memilihnya.

Hal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa relasi interpersonal dalam lingkup pondok pesantren dapat memupuk kepercayaan politik pada santri sesuai dengan penelitian yang dilakukan Anderson (2010) yang menyatakan

bahwa pengaruh sosial seperti komunitas dapat secara signifikan mempengaruhi kepercayaan seseorang dalam hal politik maupun mengubah image pribadi seseorang terlepas dari bagaimanapun sifat individu pribadi tersebut seperti bagaimana wataknya, jenis kelamin, dan pendidikannya karena image sebagai seseorang yang harus dihormati tadi sudah cukup sebagai dasar landasan kepercayaan bagi santri kepada kiai-nya.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Jie Lu (2014) yang dilakukan di China membuktikan bahwa tingkat kepercayaan politik yang dimiliki oleh masyarakat China berdasar pada bagaimana pandangan mereka tentang pelayanan baik yang dilakukan oleh pemerintahan China pada rakyatnya sehingga mereka mampu memahami secara detil apa perbedaan dari keinginan atau niat yang ada pada masyarakat China terhadap pemerintahannya dengan bagaimana sesungguhnya kompetensi yang dimiliki oleh pemerintahan disana. Hal tersebut sebenarnya berdampak pada bagaimana partisipasi politik masyarakat disana, dimana sebagian besar rakyat memiliki pandangan yang positif terhadap pemerintahannya namun di sisi lain tetap merasa pesimis tentang ketidakmampuan untuk mendapatkan atau mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik. Pada penelitian ini pun dapat dilihat bagaimana kepercayaan politik sungguh memiliki andil yang cukup besar dalam menciptakan sebuah partisipasi masyarakat dalam dunia politik disana.

Lebih lanjut, Gronlund & Setala (2007) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa bagaimana individu yang mengembangkan sebuah kepercayaan pada parlemen ataupun pemerintahan memiliki peran yang cukup signifikan dalam

bagaimana meningkatnya partisipasi dalam sebuah kegiatan politis seperti kegiatan pemungutan suara. Hal tersebut menggambarkan bahwa ketika seseorang memiliki sebuah tingkat kepercayaan politik yang tinggi maka hal tersebut akan berdampak pada bagaimana individu tersebut berpartisipasi pada setiap kegiatan yang memiliki hubungan politis seperti ikut dalam sebuah pemungutan suara dan melakukan sebuah perilaku memilih. Blind (2006) berpendapat bahwa partisipasi tersebut adalah sebuah output dari bagaimana masyarakat menilai pemerintahan dengan baik secara kebijakan maupun bagaimana pemimpin politik memenuhi janjinya serta bersikap adil dan jujur.

Plano (1985) dalam teorinya menjelaskan bahwa perilaku memilih merupakan sebuah studi yang memusatkan diri pada sebuah bidang yang berfokus untuk menekuni kecenderungan pilihan masyarakat dalam sebuah kegiatan pemilihan umum, serta untuk mengetahui apa yang mendasari seseorang dalam melakukan kegiatan tersebut. Perilaku memilih didasari oleh sebuah pemikiran bahwa penentuan pilihan pada sebuah pemilihan umum didasari oleh sebuah kecocokan dan rasa percaya kepada institusi, calon ataupun kandidat tersebut karena berbagai faktor yang melatar belakangnya. Newton (2008) juga memiliki pandangan yang sama terkait hubungan antara sebuah kepercayaan politik dengan bagaimana perilaku memilih bisa dihasilkan. Menurutnya sebuah kepercayaan politik tidak hanya menjadi hubungan horizontal antar masyarakat namun hubungan tersebut juga berlandaskan kepercayaan dari seorang warga negara terhadap otoritas ataupun lembaga politik yang ada di negaranya, hal tersebut biasanya berkaitan dengan

bagaimana sistem negara yang dimiliki, aturan atau bahkan prosedur yang dimiliki untuk menjalankan sebuah negara sehingga hal tersebut menumbuhkan kepercayaan yang mengarahkan seorang individu untuk turut berpartisipasi pada setiap kegiatan politik di negaranya.

Campbell, dkk (1960) mengemukakan bahwa salah satu pendekatan yang digunakan untuk memupuk rasa percaya kepada sebuah institusi politik di sebuah negara adalah pendekatan sosial psikologis. Pendekatan ini menurut Campbell berusaha menerangkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan perilaku memilih yang dijelaskan melalui bagaimana identifikasi partai yang dimiliki seseorang tersebut, bagaimana pandangan orang tersebut terhadap kandidat yang akan dipilihnya hingga seberapa relevan apa yang disampaikan oleh kandidat-kandidat tersebut terhadap isu real yang sedang terjadi disekitar lingkungan individu tersebut. Dari ketiga trias determinan tersebut, menurut Campbell memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku seseorang dalam sebuah pemilihan umum dan ketiga trias determinan tersebut didasari oleh bagaimana seorang individu memiliki sebuah kepercayaan terhadap politik di negaranya yang akan memiliki dampak langsung terhadap bagaimana seorang individu tersebut akan melakukan sebuah perilaku memilih.

Trias determinan yang dikemukakan oleh Campbell dkk (1960) merupakan sebuah konsep bagaimana perilaku memilih bisa terjadi dan setiap aspek dari trias determinan tersebut memiliki sebuah hubungan dengan bagaimana tingkat kepercayaan politik oleh seseorang. Yang pertama yaitu

bagaimana perasaan emosional yang dimiliki seorang individu kepada partai tertentu dapat menjadi alasan seseorang untuk turut berpartisipasi dalam sebuah pemilihan umum. Hal ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana seseorang tersebut memiliki sebuah standart yang dipenuhi oleh partai tersebut serta bagaimana tingkat kepercayaan yang dimiliki pada parta tersebut entah yang berasal dari pengalman terdahulu ataupun bagaimana penawaran politik yang dilakukan oleh partai tersebut menjadi sesuatu yang menarik bagi seorang individu tadi.

Yang kedua adalah bagaimana isu-isu atau kebijakan yang diusung oleh kandidat ataupun partai yang dinilai relevan dengan situasi di sekitar individu pemilih tadi. Hal ini pun memiliki kaitan dengan bagaimana Zhang dan Wang (2010) yang menyatakan bahwa kepercayaan politik merupakan sebuah bentuk evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja pemimpin politik dan hal tersebut mencakup bagaimana kesesuaian kebijakan-kebijakan yang berlaku terhadap isu-isu yang sedang terjadi.

Lalu, yang ketiga ialah bagaimana citra kandidat yang dimiliki oleh para pemilih mencakup sifat-sifat pribadi ataupun bagaimana janji-janji politis yang dibuat apakah dirasa bisa direalisasikan atau tidak. Hal ini tentunya bersinggungan langsung dengan bagaimana seorang individu memiliki rasa percaya kepada janji-janji politis yang dibuat oleh seorang calon kandidat sehingga ia melaksanak sebuah perilaku memilih kepada kandidat tersebut. Gamson (2005) menjelaskan bahwa kepercayaan politik yang dimiliki oleh masyarakat merupakan kepercayaan yang berdasarkan atas bagaimana tindakan

yang dilakukan suatu pemerintahan apakah itu untuk kepentingan individu ataupun untuk kepentingan publik sehingga individu pemilih tadi mampu menilai calon-calon kandidat tersebut berdasarkan kepercayaan politik yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian oleh peneliti dikomparasikan dengan teori yang ada maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian ini dimana membuktikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan politik yang dimiliki oleh seorang individu dengan bagaimana individu tersebut melakukan sebuah perilaku memilih pada Pemilu 2019 lalu. Beberapa hal seperti aspek sosial psikologis, perasaan emosional, identifikasi partai politik, lalu relevansi isu terhadap kebijakan hingga citra calon kandidat menjadi alasan seseorang untuk mau berpartisipasi dalam sebuah kegiatan pemilihan umum dan menerapkan sebuah perilaku memilih.

Hasil penelitian ini membuktikan jika individu semakin memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi akan sebuah hal yang berhubungan dengan politik di negaranya maka semakin tinggi pula alasan orang tersebut untuk ikut serta berpartisipasi dan menerapkan sebuah perilaku memilih dalam kegiatan pemilihan umum yang dilakukan di daerahnya. Oleh karenanya semakin tinggi kepercayaan politik yang dimiliki individu maka semakin tinggi pula intensitas perilaku memilih yang dilakukan individu tersebut.









- Jie, L. (2014). A Cognitive Anatomy of Political Trust and Respective Bases: Evidence from a Two-City Survey in China. *Political Psychology*. Vol. 35, No. 4
- Hadi, S. (2004). *Metodologi Research. Untuk penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, Dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Lathifiyah, K. *Sekelompok Santri di Jatim Deklarasi Golput*. (15 April 2019. Jatimnet.com). (on-line) diakses pada 25 Mei 2019. <https://jatimnet.com/sekelompok-santri-di-jatim-deklarasi-golput>
- Levi, M., L. Stoker. (2000). *Political Trust and Trustworthiness: Annual Review of Political Science* 3(1): 475-570
- Mangum, Maurice. (2003). Psychological Involvement and Black Voter Turnout. *Political Research Quarterly*. Vol 56. Iss 1. P41. Salt Lake City
- Matulesy, Andik. (2018). *Psikologi Politik*. Malang: Intrans Publishing
- Mayer, R. C., Davis, J.H. & Schoorman, F.D. (1995). An Integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*. 20, 709-734
- McKnight, D.H. and Chervany, N. L. (2006). Reflection on an initial Trust-Building Model.
- Misztal, B. (2001). Trust & cooperation: The democratic public sphere. *Journal of Sociology*. 37(4), 371-386
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosda Karya
- Nurfitri, A. D. (2018). Hubungan antara Efikasi Politik dan Kepercayaan Politik dengan Partisipasi Politik Daring pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial di Kota Semarang. *Tesis*. Universitas Katolik Soegijapranata
- Poerwandari, E. (2009). *Pendekatan kualitatif. Cetakan ketiga*. Depok. lembaga pengembangan sarana pengukuran dan pendidikan psikologi fakultas psikologi UI
- Renaldi, A., Wargadiredja, T. (2019). *Beginilah yang Dilakukan Seorang Aktivist Golput saat Datang ke TPS*. Berita Vice (online) diakses pada 21 Mei 2019 ([www.vice.com](http://www.vice.com))
- Satrio, A.D. *30% Masyarakat Diprediksi Golput di Pemilu 2019*. Berita Okezone (online) diakses pada 21 Mei 2019 ([www.okezone.com](http://www.okezone.com))

- Soeryono, A. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syukuri, Z. I. (2018). Pengaruh Iklan Politik Media Luar Ruang pada Pilgub 2018 terhadap Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Sy Pahmi. (2010). *Politik Pencitraan*. Garung Persada Press. Jakarta
- Taufiqurrahman., & Himam, F. (2014). Kepercayaan Politik Mahasiswa Santri terhadap Kiai dalam Perspektif Psikologi Perkembangan. *Jurnal Psikologi Tabularasa*. Vol 9, No.1, 15-29
- Yanuarti, S. (2009). Golput dan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*. 06, (01), 21-32
- Zhang,Q. & Wang, E. (2010). Local political trust, the antecedents an effect on earthquake victim's choice for allocation of resource. *Social Behavior and Personalty*, 38(7), 929-940

